

**Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan  
Pembangunan Di Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea**

**Joshua Jortji The<sup>1</sup>  
Daud M. Liando<sup>2</sup>  
Welly Waworundeng<sup>3</sup>**

*Email Korespondensi: joshua.jortji06@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut untuk mengetahui, Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang agrobisnis dan pariwisata, Meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan Dari segi Produktivitas LPMK Wanea masih tidak berjalan dengan baik. dalam hal Penyusunan Rencana Pembangunan yang Partisipatif, Dari segi Responsivitas LPMK Kelurahan Wanea tidak berjalan dengan baik dan tidak mampu sepenuhnya dalam menjalankan tujuannya menangani kebutuhan masyarakat, Responsibilitas LPMK Wanea terlihat kurang baik. Ini dikarenakan LPMK Wanea hanya berpaku terhadap Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Manado.

***Kata Kunci: Kinerja, Lembaga Pemberdayaan, Pembangunan***

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Menunjuk pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Manado, sebagaimana diamatkan menyebutkan bahwa di kelurahan dapat dibentuk LPM yang diarahkan untuk memberdayakan segenap potensi yang dimiliki masyarakat, selanjutnya nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan disingkat (LPM-K), pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dipilih dari kalangan tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Cendekiawan dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Masyarakat yang ada di Kelurahan.

LPMK sebagaimana dimaksud tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintah, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud LPMK mempunyai fungsi sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat, penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, penumbuhkembangkan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat dan pendukung

media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Berangkat dari kondisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa LPMK merupakan mitra Pemerintahan Kelurahan dalam menyukseskan pembangunan. Dengan perkataan lain, untuk mewujudkan dan mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan dan kinerja LPMK yang maksimal. Peran dan kinerja LPMK menjadi faktor yang sangat penting bagi implementasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

LPMK merupakan suatu Lembaga yang menjadi mitra Pemerintah Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, namun pada kenyataannya keberadaan LPM di Kelurahan Wanea belum melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja LPM Kelurahan Wanea dalam pembangunan.

Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan, menunjukkan bahwa LPM sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada dikeluarkan Wanea Belum mampu melihat Kinerja sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintahan dalam proses pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Kinerja LPM dalam proses pembangunan merupakan faktor sentral yang mengatur semua sarana dan prasarana di kelurahan. Posisi strategi LPM hanya akan dapat dirasakan oleh masyarakat apabila wadah tersebut dapat melaksanakan tugas pokoknya sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di kelurahan.

Rendahnya tingkat kemajuan LPM ditandai oleh kurang aktifnya warga masyarakat dalam wadah organisasi tersebut baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program-program pembangunan, oleh karena itu dengan lemahnya kinerja LPM dalam melakukan kegiatan pemberdayaan di masyarakat Kelurahan, khususnya di Kelurahan Wanea. Gambaran diatas menumbuhkan suatu dorongan untuk memperoleh jawaban mengenai gejala rendahnya manfaat organisasi tersebut bagi kehidupan masyarakat. Kinerja LPM yang rendah diduga berkaitan dengan faktor internal maupun eksternal organisasi LPM..

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan menurut Agus Dwiyanto (2006:50) dalam bukunya Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Indikator Pengukuran Kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto meliputi lima Indikator, yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. peneliti memilih untuk menggunakan Kelima indikator diatas ini dirasa telah mewakili indikator yang banyak digunakan untuk menilai Kinerja Suatu Lembaga.

Adapun aspek penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut;

1. Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif.
2. Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat.

3. Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan..

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Display Data dan Pengambilan Keputusan.

### Pembahasan

1. Produktivitas

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yang ada menunjukkan bahwa produktivitas yang ada di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wanea terkait dengan dilihatnya dari kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menyelesaikan program-program pembangunan yang sudah diusulkan pada saat Musrenbang dapat terlaksana di Kelurahan Wanea sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi capaian kerja terkait dengan program pelaksanaan dan pengendalian yang sudah berjalan tetapi belum maksimal karena masih memiliki beberapa kendala atau hambatan terlihat dari penanganan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang masih tidak tepat sasaran. Pelaksanaan fungsi LPMK

dapat dikatakan produktif apabila target yang telah direncanakan tercapai dan tepat sasaran.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yang menunjukkan bahwa dalam hal menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat merupakan kegiatan gotong royong yang harus rutin dilakukan. Kegiatan ini mampu menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat. Secara praktis kegiatan ini sudah ada, hal ini ditandai dengan kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh Pemerintah setempat di tiap-taip Lingkungan. Namun menurut hasil penelitian yang dilakukan dengan informan kegiatan ini masih bisa dibilang belum terlaksana sepenuhnya karena kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh pemerintah setempat belum mampu mendorong kembali dalam hal menguatkan budaya gotong royong di tengah masyarakat. Kegiatan gotong royong hanya sebatas membersihkan lingkungan sekitar, tidak berimplikasi pada perilaku budaya swadaya yang kelak merupakan embrio pembangunan berbasis swadaya gotong royong masyarakat. Ironisnya lagi, menurut informan gotong royong yang dilakukan pemerintah setempat dalam membersihkan lingkungan sekitar hanya diikuti oleh segelintir warga masyarakat, dikarenakan masih ada masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kegiatan tersebut.

## 2. Kualitas Layanan

Kualitas Layanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan dari masyarakat, kepuasan masyarakat juga bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik dalam hal kualitas layanan yang diberikan oleh

organisasi. Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima dari organisasi publik (Agus Dwiyanto, 2006 : 50). menarik kesimpulan dari atas bawah pelayanan publik yang baik berasal dari kualitas layanan yang baik yang dilakukan oleh lembaga/organisasi.

Dari penelitian yang peneliti lakukan dalam merencanakan suatu program pembangunan yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sudah ada program-program yang diusulkan akan tetapi ada juga masyarakat yang kurang puas dengan program-program yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dimana masih ada masyarakat yang mengeluhkan lebih membutuhkan hal lain ketimbang program yang di usulkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, disini kita melihat masih menjadi masalah yang amat penting untuk diperhatikan oleh Lembaga tersebut agar kualitas layanan yang diberikan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

## 3. Responsivitas

Responsivitas (responsiveness) di sini adalah kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk mengenali kebutuhan masyarakat atau dengan kata lain adalah semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik maka kinerja organisasi tersebut akan dinilai baik. (Agus Dwiyanto, 2006 : 50)

a. Responsivitas dalam hal Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif.

Hasil Penelitian yang dilakukan terhadap para informan menunjukkan bahwa LPMK sudah melakukan atau merencanakan pembangunan secara partisipatif dan responsive pada saat melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat Kelurahan namun untuk kinerja dalam melaksanakan, menampung aspirasi masyarakat serta melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan belum menunjukkan tingkat kinerja yang maksimal. Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui jika masih ada masyarakat yang masih tidak mengetahui tentang LPMK beserta program-program yang telah di buat.

Pada kenyataannya LPMK belum mampu menggerakkan pembangunan dengan berbasis pada swadaya masyarakat, LPMK Kelurahan Wanea dalam melaksanakan pembangunan masih mengandalkan pembanguan yang dibiayai oleh pemerintah (APBD). LPMK hanya berpartisipasi pada usulan rencana pembangunan dengan mengusulkan rencana-rencana atau rancangan program pembanguan yang dibuat melalui kegiatan musrenbang.

b. Responsivitas dalam hal Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat

Gotong royong merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan untuk menjalin kedekatan antara pihak pemerintah dan masyarakat. Gotong royong dilakukan dilingkungan sekitaran Kelurahan atau di setiap lingkungan masing-masing untuk merawat dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih. Meskipun gotong royong merupakan kegiatan rutin namun dari pihak

Pemerintah beserta LPMK belum mampu menggerakkan budaya swadaya masyarakat secara maksimal. Untuk masyarakat sendiri yang mengikuti kegiatan gotong royong ini hanya sedikit sekali dan ada pun yang acuh tak acuh terhadap kegiatan tersebut.

c. Responsivitas dalam hal melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Selaras dengan aspek diatas, dikarenakan belum berfungsi optimalnya LPMK dalam menggerakkan pembanguan melalui swadaya gotong royong masyarakat maka dalam konteks melaksanakan pembangunan, LPMK masih mengandalkan dana pemerintah. LPMK hanya mampu mengusulkan rencana pembangunan melalui Musrenbang terutama Musrenbang tingkat Kelurahan. Selama ini dana bantuan untuk LPMK bersumber dari dana APBD Provinsi maupun dana APBD Kota Manado.

Dengan demikian kedepannya peran LPMK hendaknya lebih dimaksimalkan terutama dalam hal melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara swadaya. Namun apresiasi patut juga diberikan kepada LPMK karena sudah melaksanakan kegiatan proses perencanaan melalui Musrenbang di tingkat Kelurahan untuk melaksanakan proses agar berjalan dengan baik.

4. Responsibilitas

Responsibilitas disini menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang eksplisit maupun implisit. (Agus Dwiyanto, 2006 : 50)

Tingkat responsibilitas dapat diukur dengan melihat apakah

pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMK tunduk terhadap aturan-aturan atau kebijakan yang berlaku atau tidak. Dengan kata lain melihat bagaimana respon LPMK terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Semakin mengerti dan tunduk dengan melaksanakan aturan yang berlaku dalam setiap aktivitas LPMK melalui pengurusannya maka semakin baik penilaian terhadap kinerja LPMK. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi diketahui bahwa pengurusan LPMK mengetahui aturan-aturan atau kebijakan yang berlaku dan serta mesti ditaati setiap aturan yang berlaku.

Dan menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan di LPMK Kelurahan Wanea melakukan seluruh kegiatan mengacu pada (PERDA) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Manado.

#### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas dan Responsibilitis sering didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban dalam rangka memahami konsep akuntabilitas sangat dibutuhkan suatu analisis yang jelas dan mendalam sehinggah tidak tumpang tindih dengan pengertian responsibilitas. Jadi akuntabilitas dan responsibilitas saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh. Dalam beberapa kajian disebutkan bahwa akuntabilitas lebih baik dan berbeda dengan responsibilitas.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak tau kewenangan untuk meminta

keterangan atau pertanggung jawaban. Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bawah para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat (Agus Dwiyanto, 2006:50). Miriam Budiarmo juga mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat, Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Karena penelitian ini bersifat kualitatif maka dalam proses penelitian ditemukan faktor lain yang kemudian mempengaruhi tidak efektifnya kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Wanea, faktor yang dimaksud peneliti yaitu faktor internal dan factor eksternal.

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi tidak optimalnya kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yaitu anggaran. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya juga bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wanea hanya bertugas dalam hal pembuatan musrenbang untuk merencanakan pembangunan selebihnya untuk masalah dana masih bergantung kepada pemerintah yang mendanai setiap pelaksanaan

pembangunan di kelurahan wanea. Hal ini pun berimbas kepada program – program pembangunan yang sudah direncanakan tidak semuanya berjalan sesuai dengan harapan atau apa yang direncanakan. hal ini diperparah dengan tidak adanya kerja sama dengan pihak swasta sebagai infestor sehingga pembangunan di beberapa objek harus dilakukan secara bertahap dan cenderung terbengkalai. Serta kepengurusan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang sudah berapa periode tidak berubah yang mengakibatkan ada beberapa anggota LPMK yang sudah tidak ada/ sudah tidak menetap di kelurahan wanea serta bahkan sudah ada anggota LPMK yang sudah meninggal. Mengakibatkan kinerja LPMK tidak berjalan dengan baik.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi tidak optimalnya kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wanea dalam hal menjaga dan merawat pembangunan antara lain yaitu faktor budaya masyarakat. Budaya yang peneliti maksudkan disini yaitu budaya gotong royong mengenai masih adanya masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pembangunan yang sudah ada yang kemudian menyebabkan setiap pembangunan tersebut dibiarkan dan tidak dirawat. Sehingga usaha yang dilakukan pemerintah menjadi sia-sia. Kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih rendah Dari hasil temuan penulis, partisipasi masyarakat masih rendah masyarakat tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh LPMK dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain lemahnya pemahaman masyarakat mengenai LPMK mereka juga susah

untuk dapat menghadiri kegiatan LPMK tersebut karena memiliki kegiatan lain. Dan juga kurangnya Komunikasi antara LPMK dan masyarakat yang membuat hubungan antara LPMK dan Masyarakat kurang terjalin dan kurangnya sosialisasi dari LPMK kepada masyarakat yang membuat masyarakat tidak mengetahui tentang LPMK beserta rancangan-rancangan program yang dibuat oleh LPMK.

## Penutup

### Kesimpulan

#### 1. Produktivitas

Dari segi Produktivitas LPMK Wanea masih tidak berjalan dengan baik. dalam hal Penyusunan Rencana Pembangunan yang Partisipatif, hal ini berupa pelibatan masyarakat dalam membuat program kerja LPMK dan melaksanakan usulan musrembang. Meskipun dalam hal ini ada program-program usulan pembangunan yang telah dibuat akan tetapi masih ada yang belum terealisasi dan juga ada beberapa kendala atau hambatan terlihat dari penanganan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang masih tidak tepat sasaran dan juga tidak produktivitasnya kinerja Lpmk terlihat dari beberapa anggota Lpmk yang sudah tidak berdomisili di tempat kelurahan Wanea.

#### 2. Kualitas Layanan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sudah ada program- program yang diusulkan akan tetapi ada juga masyarakat yang kurang puas dengan program-program yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dimana masih ada masyarakat yang mengeluhkan lebih membutuhkan hal lain ketimbang program yang di usulkan oleh

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

### 3. Responsivitas

Dari segi Responsivitas LPMK Kelurahan Wanea tidak berjalan dengan baik dan tidak mampu sepenuhnya dalam menjalankan tujuannya menangani kebutuhan masyarakat dikarenakan LPMK Wanea dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dibuat kurang aktif, ini terbukti dari tidak semua anggota yang ikut serta menjalankan kegiatan yang telah dibuat dan kurang aktif turun dimasyarakat. Sehingga masyarakat kurang tau tentang LPMK serta tidak dapat merasakan secara langsung dampak yang timbul dari kegiatan LPMK. Akibatnya LPMK Wanea tidak dapat membaca dan menangani kebutuhan yang ada pada masyarakat.

### 4. Responsibilitas

Responsibilitas LPMK Wanea terlihat kurang baik. Ini dikarenakan LPMK Wanea hanya berpaku terhadap Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Manado. Ini pun LPMK dalam melaksanakan program dan kegiatannya masih tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus dilakukan dan dari latar belakang bidang yang mereka jabati tidak sesuai dengan porsinya.

### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas LPMK Kelurahan Wanea masih terlihat kurang. Terlihat dari kurangnya hasil dokumentasi sebagai bentuk laporan dan pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMK. LPMK Wanea juga tidak memiliki fasilitas gedung sendiri sehingga minimnya dokumen- dokumen yang berkaitan tentang LPMK Wanea.

## Saran

1. Diharapkan kepada aparat Kelurahan untuk memberikan perhatian dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat, menggerakkan, mengajak atau mengundang masyarakat untuk berpartisipasi sehingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tidak berjalan dengan sendirinya serta perlu adanya pemahaman yang baik tentang alur dan tahapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Diharapkan juga kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan agar dapat memotivasi banyak masyarakat untuk dapat ikut serta di setiap kegiatan atau program yang dilakukan.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung didalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk ikut serta dalam pembangunan di Kelurahan.
3. Diharapkan kepada pihak aparat Kelurahan/Desa, pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan masyarakat untuk bekerjasama dalam hal merencanakan pembangunan, menentukan prioritas usulan program, ikut serta dalam setiap kegiatan gotong royong, dan keikutsertaan masyarakat dalam rapat yang diadakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, memanfaatkan dan merawat pembangunan yang sudah dibangun, pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan dan dengan



memberikan biaya operasional bagi Lpmk.

### Daftar Pustaka

- A.A, Anwar, Prabu, Mangkunegara. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Adi, Rukminto, I. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Pengantar pada pemikiran dan Pendekatan Praktis, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Dwiyanto, Agus. 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, UGM, Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu, S.P. 1999. Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas. Bumi Aksara. Jakarta.
- K. Suhendra, 2006, Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, Alfabeta, Bandung
- Lexi, J. Moleong. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. (Edisi Revisi) Bandung: PT. Remaja Bosdakarya.
- Listyaningsih. 2014. Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mahsun, Mohammad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
- Siagian, Sondang, P. 2001, Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategis. Bina Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekata Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suparjan, Hempri, Suyanto. 2003. Pembangunan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan. Aditya Media, Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2006. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Jakarta: Bayumedai Publishing.
- Jurnal:
- Juita, L, Tiwa 2017. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan PaalDua Kecamatan PaalDua Kota Manado. Jurnal Unsrat
- Ricky, M, Mawitjere 2018. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Jurnal Unsrat
- Sumber-Sumber Lain:
- Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga
- Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Kemasyarakatan.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Manado